



Tantangan Sosial di Tengah Polarisasi Politik Identitas

Ben Petrus Sianturi*, Riris Johanna Siagian

Sekolah Tinggi Theologia HKBP Pematangsiantar

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3364>

*Correspondence: Ben Petrus Sianturi

Email: benpetrus95@gmail.com

Received: 07-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze various social challenges that arise amid the strengthening of identity-based political polarization in multicultural societies. The intensifying identity politics polarization in recent years has not only affected social and political stability but has also disrupted interpersonal relations, weakened public trust in institutions, and hindered cross-group collaboration. This research seeks to identify the main forms of polarization that emerge, such as social segregation based on ethnicity and religion, the rise of hate speech, and the strengthening of symbolic competition that limits spaces for dialogue and inter-identity encounters. The primary objective of this study is to understand how identity-based political polarization influences social cohesion and to formulate mitigation strategies that can be undertaken by the government, religious organizations, civil society groups, and educational institutions. This approach emphasizes the importance of reconstructing a culture of dialogue, building cross-identity networks, and strengthening social and political literacy to minimize potential conflict and enhance social resilience. In addition, this study aims to propose an approach model that can serve as a policy reference in creating inclusive, democratic, and non-discriminatory public spaces. This research is expected to contribute to the enrichment of academic studies on the impacts of identity-based political polarization and provide a conceptual foundation for sustainable social transformation within plural societies.*

Keywords: *Political Polarization, Identity, Social Cohesion, Church, Tolerance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai tantangan sosial yang muncul di tengah menguatnya polarisasi politik identitas dalam masyarakat multikultural. Polarisasi politik identitas yang semakin menajam dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya memengaruhi stabilitas sosial dan politik, tetapi juga mengganggu relasi antarwarga, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi, serta menghambat kolaborasi lintas kelompok. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk utama polarisasi yang muncul, seperti segregasi sosial berdasarkan etnis dan agama, meningkatnya ujaran kebencian, serta menguatnya kompetisi simbolik yang membatasi ruang dialog dan pertemuan antaridentitas. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana polarisasi politik identitas mempengaruhi kohesi sosial masyarakat, serta merumuskan strategi mitigatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah, organisasi keagamaan, komunitas sipil, dan lembaga pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya rekonstruksi budaya dialog, pembangunan jejaring lintas identitas, serta penguatan literasi sosial dan politik guna meminimalkan potensi konflik serta meningkatkan resiliensi sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan menawarkan model pendekatan yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dalam menciptakan ruang publik yang inklusif, demokratis, dan anti-diskriminatif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan kajian akademik mengenai dampak polarisasi politik identitas serta menyediakan landasan konseptual bagi upaya transformasi sosial yang berkelanjutan dalam masyarakat plural.

Kata kunci: Polarisasi Politik, Identitas, Kohesi Sosial, Gereja, Toleransi

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, dinamika sosial-politik global menunjukkan bahwa politik identitas semakin mengemuka sebagai salah satu kekuatan paling menentukan dalam pembentukan opini publik, mobilisasi massa, dan arah kebijakan suatu bangsa. (Roce

Marsaulina, 2024, pp. 50–51) Politik identitas, yaitu praktik penggunaan identitas sosial seperti etnisitas, agama, ras, dan kelompok kultural sebagai dasar artikulasi kepentingan politik, tidak hanya bertumbuh dalam konteks negara-negara multikultural, tetapi juga dalam masyarakat yang sebelumnya relatif homogen secara kultural. Fenomena ini menandai pergeseran dari politik berbasis isu substantif menuju politik yang mengutamakan simbolisme identitas dan afiliasi kelompok. Dalam konteks tersebut, polarisasi politik identitas menjadi salah satu tantangan sosial terbesar, terutama karena ia berpotensi merusak kohesi sosial, memperdalam segregasi antar kelompok, dan melemahkan kapasitas institusi demokratis. (Yayasan Seni Cemeti, 2002, pp. 9–10)

Polarisasi politik identitas terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam blok-blok sosial yang saling berlawanan berdasarkan struktur identitas tertentu. (Muhtar Haboddin, 2012, pp. 1–12) Perpecahan ini tidak sekadar mencerminkan perbedaan preferensi politik, tetapi menciptakan identifikasi emosional yang kuat terhadap kelompok sendiri (in group) dan resistensi terhadap kelompok lain (out group). Dalam kondisi ekstrem, polarisasi ini mendorong lahirnya stereotip negatif, dehumanisasi, serta justifikasi terhadap tindakan diskriminatif atau kekerasan. Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, India, dan beberapa negara Eropa, polarisasi identitas terbukti mengganggu stabilitas politik dan merusak ruang deliberatif publik. Dalam konteks Indonesia, fenomena yang serupa tampak melalui meningkatnya sentimen sektarian dalam kontestasi politik, terutama pascareformasi ketika ruang demokrasi semakin terbuka dan memungkinkan identitas tertentu dieksploitasi sebagai komoditas politik. (Benyamin F. Intan, 2024, p. 24)

Dalam kehidupan masyarakat, polarisasi politik identitas berdampak langsung pada hubungan antar warga. (Yeni Sri Lestari, 2018, pp. 19–30) Pada satu sisi, identitas kolektif merupakan unsur penting dari pembentukan solidaritas sosial. Namun, ketika identitas dipolitisasi dan direduksi menjadi alat perebutan kekuasaan, ia kehilangan fungsi kohesifnya dan berubah menjadi pemicu fragmentasi sosial. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keragaman yang relatif damai dapat terperangkap dalam konflik laten, ketidakpercayaan, dan ketegangan sosial yang berkepanjangan. (Tim Majalah Tempo, 2010, pp. 15–16) Dalam konteks digital, fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menciptakan ruang gema dan gelembung informasi, memperkuat bias konfirmasi, dan menyebarkan narasi sektarian secara cepat dan masif. (Budiawan, 2025, p. 14) Akibatnya, batas antara fakta dan opini menjadi kabur, dan ruang publik semakin didominasi oleh wacana emosional yang tidak produktif.

Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi polarisasi politik identitas adalah rusaknya kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif. (Yeni Sri Lestari, 2018, pp. 19–30) Ketika identitas dijadikan dasar perbedaan politik, narasi lawan politik tidak lagi dibaca sebagai alternatif pandangan, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok sendiri. Ini mendorong munculnya sikap menang kalah yang menghambat kompromi politik dan kolaborasi sosial. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut mengancam keberlanjutan demokrasi deliberatif, karena proses pengambilan keputusan akan lebih didorong oleh antagonisme identitas daripada argumentasi rasional dan kepentingan bersama.

Secara institusional, polarisasi politik identitas juga melemahkan legitimasi lembaga negara. Ketika lembaga-lembaga seperti pengadilan, parlemen, atau komisi pemilihan dianggap mewakili identitas kelompok tertentu, kepercayaan publik pun tergerus. Dalam situasi seperti ini, negara kehilangan kapasitasnya untuk berfungsi sebagai penengah yang adil dan dipercaya oleh semua golongan. Hal ini berbahaya bagi negara plural seperti Indonesia yang bertumpu pada prinsip Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar hidup bersama. Jika politisasi identitas tidak dikelola dengan bijaksana, ia dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional. (Umi Sumbulah, 2018, p. 25)

Dalam ranah sosial ekonomi, polarisasi identitas juga menghambat pembangunan inklusif. Ketika kebijakan publik ditentukan berdasarkan afiliasi identitas, kelompok minoritas sering terpinggirkan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Sebaliknya, kelompok mayoritas yang merasa terancam dapat menuntut perlakuan istimewa sehingga menciptakan kecemburuan sosial yang memperuncing perpecahan. Ketika ketidaksetaraan sosial dan ekonomi bertemu dengan sentimen identitas, fenomena radikalisme, populisme, dan ekstremisme menjadi lebih mudah terjadi. (James M. Gustafson, 1981, p. 45) Oleh sebab itu, polarisasi politik identitas tidak hanya masalah politik tetapi juga isu multidimensional yang menyangkut keadilan sosial, integrasi kebangsaan, dan kesejahteraan masyarakat. (Yayasan Seni Cemeti, 2002, p. 45)

Tantangan sosial yang muncul dari polarisasi politik identitas membutuhkan respons yang komprehensif dan multidisipliner. Solusi tidak dapat berhenti pada ranah politik praktis semata, tetapi harus mencakup penguatan literasi sosial, pendidikan kewargaan, dialog antar kelompok, reformasi media digital, serta revitalisasi nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Dalam konteks politik kontemporer, komunitas Kristen dipanggil untuk berperan sebagai agen rekonsiliasi yang mengupayakan jembatan lintas identitas, bukan sekadar mempertahankan kepentingan kelompoknya, melainkan menghadirkan nilai Kerajaan Allah yang inklusif. (Yayasan Seni Cemeti, 2002, pp. 45–46) Peran aktif dalam merawat dialog, memperjuangkan keadilan sosial, serta menolak narasi sektarian menjadi kontribusi penting kekristenan dalam menjaga ruang publik yang sehat. Pluralisme yang dihidupi dengan kesadaran teologis dan etika Kristen bukan hanya meredam polarisasi, tetapi juga menegaskan identitas iman yang autentik sebagai pembawa damai di tengah masyarakat yang rentan terpecah oleh politik identitas.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis kepustakaan. (Lexy J. Moleong, 2019, pp. 1–2) Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena polarisasi politik identitas dalam kaitannya dengan tantangan sosial, pluralisme, dan perspektif kekristenan. Data diperoleh melalui telaah kritis terhadap buku-buku akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen sosial-politik yang relevan. Seluruh sumber dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, konsep kunci, serta hubungan antarvariabel sosial dan teologis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi argumentatif dalam penafsiran literatur. (John W. Creswell, 2014, pp. 1–2) Metode ini memungkinkan peneliti menyusun analisis yang komprehensif dan mendalam terkait dampak polarisasi identitas serta kontribusi kekristenan dalam merawat integrasi sosial.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Polarisasi Politik Identitas dan Dampaknya terhadap Kohesi Sosial

Polarisasi politik identitas merupakan fenomena sosial-politik yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai oleh meningkatnya kecenderungan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat diri pada identitas primordial seperti agama, etnis, dan ideologi sebagai dasar orientasi politik. Dalam konteks ini, identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda sosial, tetapi juga menjadi alat mobilisasi politik yang efektif. Penggunaan identitas sebagai komoditas politik menciptakan batas-batas imajiner di antara kelompok masyarakat, sehingga membentuk konfigurasi “kami” versus “mereka.” Pola ini tidak hanya mempengaruhi dinamika politik elektoral, tetapi juga merambah dalam relasi sosial sehari-hari, memengaruhi kepercayaan, hubungan antarwarga, dan integrasi sosial secara lebih luas. (Ingat Derita Gea, 2025, pp. 69–81)

Salah satu dampak paling signifikan dari polarisasi politik identitas adalah terkikisnya kepercayaan sosial (social trust), baik dalam bentuk kepercayaan interpersonal maupun kepercayaan institusional. Ketika identitas dipolitisasi secara ekstrem, hubungan antarkelompok menjadi didasarkan pada kecurigaan dan stereotipe. Proses kategorisasi sosial yang tajam mendorong masyarakat untuk menilai individu bukan lagi berdasarkan karakter personal, tetapi berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok identitas tertentu. Konsekuensinya, ruang dialog melemah, sementara kecenderungan prasangka menguat. (Bara Izzat Wiwah Handaru, 2025, pp. 41–50) Dalam jangka panjang, kondisi ini meruntuhkan kohesi sosial karena kepercayaan adalah fondasi utama yang menopang solidaritas antarwarga.

Polarisasi politik identitas juga memicu segregasi sosial, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, masyarakat cenderung bergerak menuju ruang-ruang sosial yang homogen, misalnya dalam komunitas tempat tinggal, organisasi keagamaan, atau kelompok pertemanan. Secara psikologis, segregasi ini memunculkan “echo chambers” yang mempersempit spektrum informasi dan pandangan yang diterima individu. Dalam ruang gema tersebut, warga hanya berinteraksi dengan narasi yang memperkuat identitas kelompok mereka, sambil menolak validitas perspektif pihak lain. Dengan demikian, polarisasi identitas tidak hanya membatasi interaksi antar-kelompok, tetapi juga menghambat kemampuan masyarakat untuk memahami perbedaan dan membangun percakapan yang sehat mengenai isu-isu publik.

Selain itu, polarisasi politik identitas melahirkan dinamika kompetisi sosial yang semakin intens. Identitas kelompok diperlakukan sebagai sumber daya simbolik yang harus dipertahankan, sehingga memunculkan rasa terancam (perceived threat) terhadap kelompok lain. Pola ini seringkali diperburuk oleh elit politik yang secara strategis memanfaatkan identitas untuk memperoleh dukungan. Ketika rasa ancaman meningkat, masyarakat cenderung memperkokoh batas kelompok dan menunjukkan sikap defensif. Situasi ini berujung pada lahirnya tindakan eksklusif, diskriminatif, dan bahkan agresif yang mengganggu stabilitas sosial. Dalam perspektif kohesi sosial, kompetisi identitas semacam ini memecah aliansi sosial dan meminggirkan narasi kebersamaan. (Yusuf Ratu Agung, 2018, pp. 37–43)

Konsekuensi lain yang cukup serius adalah melemahnya kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam kondisi polarisasi identitas, konflik bukan lagi dipandang sebagai persoalan substansial, tetapi sebagai pertarungan antar-identitas. Dengan demikian, penyelesaian konflik menjadi sulit karena pihak-pihak yang terlibat cenderung mempertahankan posisi mereka demi menjaga kehormatan kelompok. Proses deliberasi publik pun terhambat karena setiap argumen direduksi menjadi representasi identitas tertentu. Ketika kemampuan untuk berdialog konstruktif menurun, masyarakat akan lebih rentan mengalami eskalasi konflik sosial yang mengancam kohesi sosial secara lebih luas. (Husnul Qodim, 2019, pp. 14–26)

Polarisasi politik identitas juga berdampak pada delegitimasi institusi publik. Ketika identitas menjadi kacamata utama masyarakat dalam menafsirkan tindakan pemerintah, media, atau institusi hukum, maka legitimasi sistemik cenderung melemah. Keputusan atau kebijakan publik sering dinilai bukan berdasarkan rasionalitas atau kepentingan umum, melainkan berdasarkan apakah aktor yang mengeluarkannya berasal dari identitas tertentu. Dalam konteks ini, aparaturnegara dapat dilihat sebagai "milik" kelompok identitas tertentu, sehingga kepercayaan terhadap netralitas institusi publik menurun. Delegitimasi ini berbahaya karena institusi publik merupakan tulang punggung integrasi sosial dan penjamin keadilan sosial. Tanpa kepercayaan terhadap institusi, masyarakat akan mengalami disorientasi mengenai arah kehidupan bersama. (Ingat Derita Gea, 2025, pp. 69–81)

Lebih jauh lagi, polarisasi politik identitas menciptakan fragmentasi memori kolektif. Narasi sejarah atau peristiwa sosial dipahami secara berbeda oleh kelompok-kelompok sosial, sesuai dengan perspektif identitas mereka. Fragmentasi ini mencederai kemampuan masyarakat untuk memiliki kesadaran sejarah yang menyatukan. Identitas kolektif yang seharusnya dibangun melalui pengalaman bersama menjadi terpecah oleh interpretasi yang saling bertentangan. Dalam jangka panjang, fragmentasi memori kolektif ini melemahkan imajinasi kebangsaan yang menjadi basis kohesi sosial dalam negara multikultural. (Ingat Derita Gea, 2025, pp. 69–81)

Di tengah dampak yang luas ini, penting untuk melihat bahwa polarisasi politik identitas bukan hanya persoalan sikap masyarakat, tetapi juga terkait dengan struktur sosial yang lebih besar. Ketimpangan sosial-ekonomi, akses terhadap pendidikan, representasi politik, dan distribusi sumber daya sering menjadi pemicu yang memungkinkan politik identitas berkembang. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa termarginalkan, mereka mudah dimobilisasi dengan narasi identitas sebagai kompensasi simbolik. Dengan demikian, upaya meredam polarisasi politik identitas tidak cukup dilakukan melalui pendidikan toleransi semata, tetapi juga melalui perbaikan struktural yang meminimalkan ketidakadilan sosial.

Upaya memperkuat kohesi sosial di tengah polarisasi politik identitas membutuhkan strategi multidimensional. Pertama, diperlukan ruang dialog antar-identitas yang inklusif, yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar membangun relasi timbal balik. Dialog semacam ini harus melibatkan masyarakat akar rumput dan bukan hanya elit. Kedua, media massa dan platform digital memegang peran penting dalam menghadirkan

narasi lintas-identitas yang konstruktif, bukan sekadar memperkuat sentimen kelompok. Ketiga, negara harus memperkuat legitimasi institusinya dengan menunjukkan profesionalisme, netralitas, dan keadilan yang konsisten. Keempat, pendidikan publik perlu mengedepankan literasi sosial dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu menilai isu politik di luar bias identitas. (Yosua Yan Heriyanto, 2025, pp. 22–37)

Polarisasi politik identitas memberikan tantangan serius bagi kohesi sosial. Fenomena ini mengancam kepercayaan sosial, memperkuat segregasi, meningkatkan rasa ancaman antar-kelompok, dan melemahkan institusi publik. Untuk menjaga keutuhan masyarakat, diperlukan respons yang tidak hanya menyoroti aspek kultural, tetapi juga struktur sosial yang lebih luas. Kohesi sosial hanya dapat terbangun apabila masyarakat mampu merawat perbedaan tanpa terperangkap dalam antagonisme identitas. Dalam konteks ini, politik identitas harus ditransformasikan dari alat polarisasi menjadi energi untuk membangun solidaritas inklusif dalam kehidupan bersama.

Dinamika dan Tantangan Konflik Sosial Akibat Menguatnya Politik Identitas

Menguatnya politik identitas dalam kehidupan publik kontemporer menciptakan lanskap sosial yang semakin kompleks, di mana perbedaan identitas digunakan sebagai landasan utama dalam pembentukan sikap politik, afiliasi kelompok, dan mobilisasi sosial. Politik identitas pada dasarnya tidak selalu bersifat negatif; ia dapat menjadi sarana artikulasi aspirasi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Namun, ketika ekspresi identitas berubah menjadi instrumen eksklusif dan antagonistik, maka dinamika sosial yang muncul justru mengarah pada konflik, fragmentasi, dan ketegangan yang berpotensi merusak struktur sosial. Kajian ini menyoroti dinamika konflik sosial yang timbul dari penguatan politik identitas serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam meresponsnya.

Salah satu dinamika utama yang muncul akibat menguatnya politik identitas adalah proses polarisasi sosial yang semakin intens. Polarisasi ini tidak hanya terjadi dalam konteks politik elektoral, tetapi juga merasuki kehidupan sosial sehari-hari. Ketika identitas, baik berbasis agama, etnis, budaya, maupun ideologis diposisikan sebagai kriteria utama dalam menilai orang lain, masyarakat menjadi mudah terbelah dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Polarisasi tersebut menciptakan situasi di mana ruang percakapan publik kehilangan nuansanya, digantikan oleh dikotomi yang kaku dan saling menegasikan. Dalam lingkungan seperti ini, narasi yang menonjol bukan lagi mengenai isu-isu substantif, melainkan mengenai siapa yang berbicara dan dari kelompok mana ia berasal.

Konflik sosial yang muncul dari fenomena tersebut seringkali dipicu oleh konstruksi identitas yang bersifat emosional dan simbolik. Identitas tidak hanya dipahami sebagai kategori sosial, tetapi juga sebagai sumber harga diri dan penghargaan kelompok. Ketika identitas kolektif dianggap terancam oleh kelompok lain, respons emosional seperti kemarahan, ketakutan, dan kecurigaan berkembang secara cepat. Emosi-emosi ini menjadi bahan bakar utama bagi konflik sosial karena ia menggerakkan massa untuk bertindak, sering kali tanpa refleksi kritis. Dalam konteks ini, politik identitas berfungsi sebagai

mekanisme yang memobilisasi sentimen ketertindasan atau superioritas, sehingga potensi konflik semakin besar.(Yosua Yan Heriyanto, 2025, pp. 22–37)

Dinamika konflik sosial akibat politik identitas juga berkaitan dengan reproduksi stereotipe dan bias antarkelompok. Stereotipe yang dilekatkan pada kelompok tertentu, baik melalui media, wacana publik, maupun narasi internal kelompok, menjadi alat untuk menggeneralisasi perilaku individu berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Ketika stereotipe ini terus diulang, ia membentuk kerangka berpikir kolektif yang sulit dibongkar. Bias antarkelompok yang muncul kemudian mempengaruhi perilaku sosial dalam skala luas, mendorong tindakan diskriminatif, eksklusif, atau bahkan represif. Dengan demikian, konflik yang terjadi bukan semata persoalan perbedaan pendapat, tetapi lebih pada ketegangan identitas yang telah dipelihara dan diperkuat secara sistematis.(Yosua Yan Heriyanto, 2025, pp. 22–37)

Menguatnya politik identitas juga mengubah dinamika relasi kekuasaan dalam masyarakat. Identitas tertentu sering digunakan untuk memperkuat legitimasi atau menantang posisi dominan kelompok lain. Dalam banyak kasus, elit politik memanfaatkan identitas kelompok sebagai modal simbolik untuk meraih keuntungan elektoral atau mempertahankan kekuasaan. Hal ini menciptakan kondisi di mana konflik sosial tidak hanya terjadi di level akar rumput, tetapi juga merupakan refleksi dari kompetisi politik di tingkat elite. Ketika elit menggunakan retorika identitas secara agresif, pesan tersebut mengalir ke bawah dan memperkuat pembelahan dalam masyarakat. Strategi ini biasanya berhasil dalam jangka pendek, namun menimbulkan dampak jangka panjang berupa rusaknya jaringan sosial dan melemahnya kesadaran kolektif tentang kepentingan bersama.

Tidak dapat diabaikan bahwa teknologi digital dan media sosial turut mempercepat dinamika konflik akibat politik identitas. Karakteristik media digital yang cepat, masif, dan tidak selalu akurat mempermudah penyebaran disinformasi maupun pesan-pesan yang bersifat provokatif. Dalam konteks politik identitas, media sosial sering menjadi ruang di mana narasi kebencian dan polarisasi berkembang tanpa kontrol. Algoritma platform digital juga memperkuat kondisi ini melalui mekanisme personalisasi konten, yang membuat individu terjebak dalam ruang informasi homogen atau 'filter bubble'. Ketika masyarakat terpapar secara konstan pada narasi yang memperkuat identitas kelompoknya, konflik sosial menjadi semakin sulit dihindari karena tidak ada mekanisme yang mendorong keterbukaan terhadap perspektif lain.(Yosua Yan Heriyanto, 2025, pp. 22–37)

Dari perspektif sosial, menguatnya politik identitas menimbulkan tantangan besar bagi integrasi sosial. Salah satu tantangan utama adalah melemahnya solidaritas sosial, baik solidaritas berbasis nilai bersama maupun solidaritas berbasis tujuan bersama. Identitas yang digunakan sebagai batas pemisah mengaburkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Ketika solidaritas antar-kelompok melemah, kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama ikut menurun. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama dalam masyarakat yang plural dan multikultural, karena kebutuhan akan kerja sama lintas identitas menjadi semakin besar dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau keamanan nasional.

Tantangan lainnya adalah meningkatnya risiko dehumanisasi. Dalam konflik identitas, kelompok lawan sering diperlakukan bukan sebagai manusia dengan martabat yang sama, melainkan sebagai ancaman yang harus dilawan. Dehumanisasi ini membuka ruang bagi tindakan kekerasan, baik dalam bentuk ujaran kebencian maupun kekerasan fisik. Ketika individu melihat kelompok lain sebagai "yang lain" (the Other), maka batas moral untuk melakukan tindakan destruktif menjadi semakin lemah. Dalam jangka panjang, fenomena ini mengikis etika sosial yang menjadi dasar kehidupan bersama.

Mengatasi dinamika konflik sosial akibat politik identitas tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal. Tantangan ini membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pertama, diperlukan pembangunan kesadaran publik mengenai pentingnya literasi identitas, yaitu kemampuan untuk memahami identitas secara kritis tanpa terjebak pada absolutisme identitas. Literasi identitas dapat dikembangkan melalui pendidikan yang mendorong refleksi, dialog, dan pemahaman lintas budaya. Kedua, negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan sosial yang mampu menjamin keadilan bagi semua kelompok, sehingga politik identitas tidak menjadi alternatif yang digunakan untuk memperjuangkan hak. Ketiga, media massa dan platform digital perlu didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam menyaring konten yang berpotensi memicu konflik identitas. (Franz Magnis-Suseno, 2016, p. 27)

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan ruang dialog yang inklusif dan berkelanjutan. Dialog yang bermakna tidak hanya bertujuan menurunkan ketegangan, tetapi juga membangun kepercayaan antar-kelompok serta merumuskan nilai-nilai bersama yang dapat menjadi dasar kehidupan publik. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan ruang percakapan yang aman dan produktif. Dialog juga harus diikuti dengan tindakan konkret yang mengatasi ketimpangan struktural, karena tanpa perubahan pada akar persoalan, konflik identitas hanya akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Politik Identitas dan Erosi Solidaritas Sosial di zaman Kontemporer

Zaman kontemporer ditandai oleh transformasi sosial yang cepat, dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi digital, perubahan pola interaksi sosial, dan dinamika politik yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, politik identitas muncul sebagai salah satu fenomena paling dominan yang membentuk orientasi politik dan relasi sosial masyarakat. Politik identitas, yang sebelumnya sering dipahami sebagai instrumen perjuangan kelompok termarginalisasi, kini menjadi kekuatan besar yang mempengaruhi narasi publik, preferensi politik, hingga pola kohesi sosial. Namun, menguatnya politik identitas juga membawa dampak signifikan terhadap solidaritas sosial, terutama ketika ia berubah menjadi mekanisme eksklusif dan antagonistik.

Politik identitas pada dasarnya berfokus pada pengakuan dan artikulasi identitas tertentu baik berbasis agama, etnis, budaya, gender, maupun ideologi untuk memperjuangkan hak, representasi, dan legitimasi. Dalam kondisi ideal, politik identitas dapat memperkaya demokrasi dengan memungkinkan suara kelompok minoritas terdengar. Namun, dalam praktiknya, politik identitas dapat mengalami distorsi ketika

identitas digunakan sebagai alat mobilisasi yang memisahkan kelompok, bukan sebagai ruang dialog dan rekognisi. Ketika identitas dipolitisasi secara berlebihan, perbedaan menjadi garis batas yang kaku, sehingga memicu konflik simbolik maupun sosial.

Erosi solidaritas sosial terjadi ketika politik identitas mengubah relasi sosial dari yang bersifat inklusif menuju eksklusif. (Jason Mandryk, 2013, p. 108) Solidaritas sosial, yang merupakan fondasi kohesi masyarakat, membutuhkan pengakuan akan nilai-nilai bersama, rasa saling percaya, dan tanggung jawab kolektif. Namun, politik identitas yang bersifat polarisatif melemahkan tiga aspek tersebut. Pertama, ia merusak nilai bersama karena kebenaran atau kepentingan publik tidak lagi ditentukan oleh argumentasi rasional, tetapi oleh suara kelompok tertentu. Ketika kebenaran dipersonalisasi berdasarkan identitas, ruang kesepakatan publik mengecil. Kedua, politik identitas menggerus kepercayaan sosial (social trust). Antarkelompok yang berbeda identitas semakin sulit mempercayai satu sama lain karena interaksi dibingkai dalam narasi ancaman atau kompetisi. Tanggung jawab kolektif melemah karena prioritas utama beralih dari kepentingan bersama menuju kepentingan kelompok. (De Gani, 2023, pp. 166–178)

Salah satu mekanisme paling kuat yang mempercepat erosi solidaritas adalah polarisasi sosial. Dalam polarisasi, masyarakat terbelah ke dalam dua kutub identitas yang saling berlawanan. Polarisasi ini tidak hanya bersifat politis tetapi juga sosial dan emosional. Politik identitas yang polarisatif memproduksi narasi emosional seperti rasa takut, curiga, atau permusuhan terhadap kelompok lain. Ketika emosi kolektif ini terakumulasi, masyarakat tidak lagi melihat kelompok lain sebagai mitra dalam kehidupan bersama, melainkan sebagai ancaman yang harus dihadapi. Dampaknya adalah berkurangnya interaksi lintas kelompok, meningkatnya stereotipe, dan hilangnya kapasitas masyarakat untuk bekerja sama.

Teknologi digital berperan sebagai katalisator utama dalam memperkuat hubungan antara politik identitas dan erosi solidaritas sosial. Media sosial menciptakan ruang publik baru yang tidak selalu mendorong dialog, tetapi justru memperkuat segregasi identitas. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, sehingga membentuk “gelembung informasi” yang mengunci individu dalam perspektif identitasnya sendiri. Dalam ruang gema semacam ini, narasi sektarian, ujaran kebencian, serta informasi yang memicu emosi negatif dapat menyebar dengan cepat. Ketika wacana publik didominasi oleh pesan-pesan yang memisahkan, solidaritas sosial menjadi korban pertama.

Selain faktor digital, kondisi ekonomi dan ketimpangan sosial turut memperburuk hubungan antara politik identitas dan erosi solidaritas. Ketika ketimpangan sosial meningkat, masyarakat lebih mudah terpecah berdasarkan identitas karena merasa identitas tertentu mendapat perlakuan lebih istimewa atau lebih dirugikan. Politik identitas menjadi alat yang digunakan baik oleh kelompok elite maupun kelompok terpinggirkan untuk membingkai ketidakadilan dalam bahasa identitas. Akibatnya, solidaritas sosial yang seharusnya dibangun berdasarkan kesetaraan dan keadilan berubah menjadi solidaritas semu yang terbatas pada kelompok identitas tertentu.

Implikasi dari erosi solidaritas sosial akibat politik identitas sangat luas. Pertama, ia melemahkan stabilitas sosial karena masyarakat kehilangan kemampuan untuk merespon perbedaan secara konstruktif. Konflik mudah diperbesar, sementara mekanisme resolusi konflik menjadi tidak efektif ketika kepercayaan antarkelompok menghilang. Kedua, demokrasi menghadapi tekanan karena politik identitas yang ekstrem menggeser fokus dari deliberasi rasional menuju kontestasi simbolik. Demokrasi kehilangan kualitas ketika masyarakat hanya berpartisipasi melalui lensa identitas kelompok. Ketiga, kemampuan masyarakat untuk menghadapi isu-isu bersama seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakadilan sosial menjadi semakin rendah karena solidaritas yang diperlukan untuk kolaborasi kolektif melemah. (De Gani, 2023, pp. 166–178)

Ketika politik identitas berkembang tanpa kontrol etis dan tanpa ruang dialog yang sehat, ia dapat menjadi kekuatan destruktif yang mengikis fondasi kehidupan bersama. Tantangan masyarakat kontemporer adalah mengembangkan model politik identitas yang konstruktif yang mendorong inklusi, pengakuan, dan keadilan sekaligus memulihkan solidaritas sosial sebagai nilai yang menopang masa depan masyarakat yang plural, adil, dan harmonis.

Peran Masyarakat Sipil dalam Meredam Polarisasi Politik Identitas

Dalam konteks tersebut, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam meredam polarisasi dan membangun ruang dialog yang inklusif. (Astuti, 2023, pp. 169–178) Masyarakat sipil, yang mencakup organisasi non-pemerintah, kelompok komunitas, lembaga keagamaan, asosiasi profesional, serta gerakan sosial, berfungsi sebagai mediator antara warga dan negara. Mereka memiliki kapasitas untuk menciptakan ruang partisipasi publik di mana berbagai kelompok identitas dapat bertemu, berdialog, dan menemukan titik temu. Melalui program-program pendidikan publik, kampanye literasi politik, dan forum diskusi, masyarakat sipil dapat menumbuhkan pemahaman lintas-identitas dan mengurangi prasangka yang menjadi bahan bakar polarisasi. (Astuti, 2023, pp. 169–178)

Selain itu, masyarakat sipil berperan dalam membangun kesadaran kritis warga terhadap manipulasi politik berbasis identitas. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan analisis yang objektif, organisasi masyarakat sipil dapat membantu masyarakat mengenali retorika identitas yang memecah belah, serta mengedepankan narasi yang menekankan nilai kebersamaan dan kepentingan publik. Dalam hal ini, peran media independen, lembaga advokasi, dan komunitas pendidikan menjadi sangat penting untuk menekan disinformasi dan ujaran kebencian yang memperburuk polarisasi.

Masyarakat sipil juga berperan sebagai pengawas sosial yang mendorong akuntabilitas elit politik. Ketika politisi menggunakan identitas kelompok untuk tujuan elektoral atau kekuasaan, masyarakat sipil dapat menyoroti praktik-praktik diskriminatif, eksklusif, atau manipulatif. Dengan cara ini, masyarakat sipil bukan hanya meredam polarisasi secara langsung melalui pendidikan dan dialog, tetapi juga secara struktural dengan menekan perilaku politik yang eksklusif. Selain intervensi langsung, masyarakat sipil dapat membangun program kolaborasi lintas-identitas, seperti kegiatan sosial, budaya, atau ekonomi yang melibatkan berbagai kelompok. Kegiatan semacam ini memperkuat

hubungan interpersonal, membangun empati, dan mengurangi stereotipe. Solidaritas yang dibangun melalui interaksi nyata jauh lebih efektif dalam menurunkan ketegangan dibandingkan kampanye retorik semata.

Relevansi

Relevansi Teologis Dan Etis Polarisasi Politik Identitas Dalam Masyarakat Plural Dan Bagi Kehidupan Kristen Kontemporer

Polarisasi politik identitas telah menjadi salah satu fenomena paling menonjol dalam dinamika sosial-politik kontemporer. Politik identitas muncul ketika kelompok-kelompok sosial menggunakan agama, etnis, budaya, atau ideologi sebagai basis dominan untuk mobilisasi politik, legitimasi kekuasaan, dan penguatan posisi dalam masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran politik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, etis, dan moral. Bagi masyarakat plural, polarisasi identitas berpotensi memecah kohesi sosial, memperlemah dialog lintas kelompok, dan meningkatkan konflik horizontal. Bagi kehidupan Kristen kontemporer, polarisasi politik identitas menimbulkan tantangan serius bagi praktik iman yang menekankan kasih, persaudaraan, dan rekonsiliasi. (W Bruce, 2006, p. 96)

Secara teologis, Kristen menekankan prinsip kesatuan dalam keberagaman. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis, "Karena semua orang adalah satu dalam Kristus Yesus" (Galatia 3:28). Ayat ini menegaskan bahwa identitas Kristiani melampaui batas-batas etnis, sosial, dan gender. Dalam konteks masyarakat plural, prinsip ini menjadi landasan penting bagi refleksi teologis terhadap polarisasi politik identitas. Polarisasi yang menekankan pemisahan kelompok berdasarkan identitas tertentu bertentangan dengan prinsip kekristenan tentang persaudaraan universal. Solidaritas, saling menghargai, dan penerimaan perbedaan menjadi nilai-nilai yang relevan dalam menghadapi tantangan politik identitas. (N. T. Wright, 2010, p. 88) Dari perspektif teologis, politik identitas yang eksklusif tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Kristen yang menekankan inklusivitas dan kasih tanpa batas.

Secara etis, polarisasi politik identitas menimbulkan dilema moral yang kompleks. Ketika kelompok-kelompok sosial menekankan kepentingan identitas tertentu, mereka sering kali mengesampingkan pertimbangan keadilan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab sosial. Prinsip etika Kristen menekankan integritas, kasih, dan keadilan sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Dalam Efesus 4:2-3, Paulus menasihati, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera." Pesan ini relevan untuk menanggapi polarisasi identitas: setiap individu dan kelompok diundang untuk menjaga persatuan dan mengedepankan rekonsiliasi, bukan memelihara perpecahan. Dalam masyarakat plural, etika ini menuntun umat Kristen untuk menjadi agen perdamaian yang mampu menjembatani perbedaan, sambil tetap menghormati keragaman identitas yang ada.

Polarisasi politik identitas sering diperkuat oleh sentimen emosional, stereotipe, dan narasi antagonistik yang diproduksi oleh elit politik maupun media sosial. Fenomena ini

mengancam kapasitas masyarakat plural untuk berdialog konstruktif. Dari perspektif Kristen, situasi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan publik dengan prinsip kasih dan keadilan. Yesus sendiri menekankan pentingnya menjadi terang dan garam dunia (Matius 5:13-16), yang secara etis dapat dimaknai sebagai panggilan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menjaga kebenaran, menumbuhkan pengertian, dan mengurangi konflik. Umat Kristen dalam masyarakat plural memiliki tanggung jawab moral untuk menolak retorika eksklusif dan diskriminatif, serta mendorong budaya dialog dan inklusivitas.

Selain itu, relevansi teologis juga terlihat dalam praktik pelayanan dan misi di masyarakat plural. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas koinonia persekutuan yang menekankan kasih, persaudaraan, dan solidaritas. Polarisasi politik identitas dapat menjadi tantangan serius bagi praktik koinonia karena mengancam nilai persatuan dan kerjasama lintas identitas. Umat Kristen di era kontemporer dihadapkan pada situasi di mana membangun relasi lintas identitas bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan etis dan teologis untuk mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Dalam hal ini, teologi diakonia menekankan bahwa iman Kristen harus terealisasi dalam pelayanan yang memperjuangkan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan semua pihak, tanpa diskriminasi identitas. (Miroslav Volf, 1996, p. 25)

Secara praktis, mengelola polarisasi politik identitas di masyarakat plural memerlukan strategi yang menggabungkan refleksi teologis dan pertimbangan etis. Pertama, gereja dan komunitas Kristen harus menguatkan pendidikan nilai, literasi politik, dan literasi sosial di kalangan jemaat. Pendidikan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran akan bahaya polarisasi identitas, sekaligus mengembangkan kapasitas warga untuk berdialog dan berkolaborasi lintas kelompok. Kedua, umat Kristen perlu aktif membangun jaringan sosial lintas identitas melalui proyek kemanusiaan, kegiatan sosial, dan program komunitas yang mengutamakan kerjasama daripada kompetisi. Dengan cara ini, solidaritas sosial yang inklusif dapat diperkuat secara nyata. Ketiga, umat Kristen di masyarakat plural harus memainkan peran sebagai mediator dan jembatan dalam konflik sosial yang muncul akibat polarisasi politik identitas. Keempat, komunitas Kristen perlu menekankan pentingnya integritas moral dalam kehidupan politik dan sosial.

Tantangan Sosial di Tengah Polarisasi Politik Identitas dalam Bingkai Pancasila dan Pluralitas Indonesia

Polarisasi politik identitas menjadi salah satu tantangan sosial paling menonjol dalam kehidupan kebangsaan Indonesia dewasa ini. Fenomena ini muncul ketika afiliasi identitas baik agama, etnis, suku, maupun kelompok sosial dipolitisasi untuk memperkuat dukungan politik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sejak awal berdiri didesain sebagai bangsa plural, polarisasi semacam ini bukan hanya memicu fragmentasi sosial, tetapi juga berpotensi melemahkan kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Politik identitas seringkali menciptakan batas-batas baru dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Pancasila yang menjadi dasar negara dan falsafah hidup bersama sebenarnya telah menyediakan kerangka etik dan sosial untuk mengelola

keberagaman. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial berfungsi sebagai prinsip pemersatu yang menolak segala bentuk diskriminasi atau dominasi identitas tertentu. (N.T. Wright, 2006, pp. 88–89) Namun, tantangannya adalah implementasi nilai-nilai tersebut yang masih kerap bersifat normatif. Dalam praktik politik, kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan simbol agama atau identitas etnis untuk membangun loyalitas politik, sehingga Pancasila tidak lagi berperan sebagai landasan moral bersama, melainkan sekadar slogan yang dipinggirkan ketika kepentingan politik mengemuka.

Selain itu, polarisasi identitas juga diperkuat oleh perkembangan teknologi digital. Media sosial menjadi ruang yang mempercepat penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, dan propaganda yang mempertebal sekat-sekat identitas. Algoritma platform digital membuat masyarakat terkurung dalam “ruang gema”, di mana mereka hanya terpapar informasi yang memperkuat pandangan kelompoknya. Akibatnya, dialog lintas identitas menjadi semakin sulit, sementara kecurigaan antarkelompok meningkat. Dalam situasi seperti ini, nilai Persatuan Indonesia dan semangat musyawarah mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi semakin sulit diwujudkan secara nyata. (Eka Darmaputera, 2001, p. 278)

Tantangan sosial lain yang muncul adalah melemahnya kepercayaan pada institusi negara. Ketika politik identitas mendominasi ruang publik, masyarakat cenderung menilai kebijakan pemerintah atau penegakan hukum berdasarkan sentimen identitas, bukan pada prinsip keadilan dan kepentingan bersama. Hal ini menggerus sila Keadilan Sosial dan mempersempit ruang deliberasi publik yang sehat. Selain itu, kelompok minoritas rentan menjadi korban diskriminasi karena narasi identitas dominan sering mengabaikan prinsip kemanusiaan universal.

Dalam kondisi seperti ini, upaya memperkuat kembali Pancasila sebagai etos kebangsaan menjadi sangat penting, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan orientasi moral yang dapat menuntun masyarakat keluar dari kecenderungan saling mencurigai dan menguatnya politik identitas. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga horizon etis yang menekankan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. (Franz Magnis-Suseno, 2016, p. 122) Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan kembali melalui pendidikan kebangsaan yang lebih transformatif bukan hanya hafalan atau sloganistik, tetapi mampu membentuk cara pandang yang menghargai kesetaraan martabat manusia serta merawat tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama. (Th. Sumartana, 2001, p. 72)

Pendidikan kebangsaan yang demikian harus menekankan praktik dialog, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai inti dari pembelajaran sosial dan kewargaan. Untuk mendukungnya, pemerintah dan lembaga sosial perlu membangun ruang publik yang inklusif, tempat warga dapat berinteraksi tanpa rasa takut atau prasangka, serta mengembangkan budaya diskusi yang sehat. Dalam ruang publik seperti itu, identitas tidak menjadi alat politisasi atau pembelahan, tetapi dihargai sebagai kekayaan budaya dan spiritual yang memperkaya bangsa. Ketika integrasi sosial dibangun di atas penghargaan

terhadap keberagaman, Pancasila kembali menemukan relevansinya sebagai kekuatan pemersatu dalam konteks Indonesia yang plural.

Tantangan Sosial di Tengah Polarisasi Politik Identitas di Kota Medan

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik nasional memengaruhi iklim sosial di Medan, terutama melalui penggunaan simbol-simbol identitas untuk memperoleh dukungan politik. Politisasi identitas ini menciptakan jarak sosial antar kelompok serta memunculkan persepsi bahwa perbedaan adalah ancaman, bukan kekayaan sosial. Polarisasi tersebut terlihat jelas dalam interaksi publik maupun media sosial. Perdebatan politik sering berubah menjadi pertentangan berbasis agama atau etnis, sehingga memperkuat narasi “kami vs mereka”. Selain itu, meningkatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memperburuk hubungan antar-komunitas. Meskipun tidak selalu muncul dalam bentuk konflik fisik, dampaknya terasa pada menurunnya kepercayaan sosial, meningkatnya kecurigaan antar kelompok, dan melemahnya ruang dialog yang sebelumnya relatif terbuka di masyarakat Medan.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah kelompok masyarakat dan institusi lokal berupaya meredakan ketegangan. Tokoh agama menginisiasi dialog lintas iman, sementara komunitas pemuda melaksanakan kampanye literasi digital dan gerakan toleransi untuk menangkal provokasi di ruang daring. Pemerintah kota juga berupaya memperkuat program kerukunan melalui kegiatan budaya dan pemberdayaan komunitas. Namun demikian, derasnya arus informasi yang dipengaruhi kontestasi politik nasional tetap menjadi faktor pemicu polarisasi yang sulit dikendalikan. Polarisasi politik identitas di Kota Medan telah menciptakan tantangan sosial yang signifikan. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru terancam terfragmentasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Untuk menjaga kohesi sosial, diperlukan penguatan pendidikan multikultural, literasi digital, serta kerja sama lintas lembaga dalam membangun ruang dialog yang inklusif. Upaya menjaga harmoni sosial harus menjadi agenda bersama agar Medan tetap menjadi kota yang mampu merawat keberagamannya di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Kesimpulan

Fenomena politik identitas telah menjadi kekuatan dominan dalam membentuk orientasi politik dan kohesi sosial, namun ketika dipolitisasi secara ekstrem, ia berubah menjadi alat eksklusif yang memperkuat polarisasi, menurunkan kepercayaan sosial, dan memicu dehumanisasi baik secara interpersonal maupun institusional. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa konflik identitas tidak hanya berakar pada narasi ideologis, tetapi diperkuat oleh struktur sosial seperti ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, serta peran media digital yang menghadirkan ruang gema yang mempercepat produksi prasangka dan ujaran kebencian. Dalam konteks pluralisme dan kehidupan kekristenan, problem ini menuntut hadirnya etika sosial yang berorientasi pada rekonsiliasi, penghormatan martabat manusia, dan solidaritas lintas identitas. Karena itu, rekomendasi praktis meliputi pengembangan ruang dialog inklusif berbasis komunitas, penguatan literasi sosial-digital, pembentukan kebijakan publik yang netral dan adil, serta keterlibatan aktif gereja dan masyarakat sipil sebagai mediator untuk memulihkan relasi

antarkelompok. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi model dialog lintas identitas yang efektif di era algoritmik, evaluasi peran lembaga keagamaan sebagai agen rekonsiliasi sosial, serta studi empiris tentang bagaimana nilai-nilai Kristen seperti kasih, penerimaan, dan damai dapat dioperasionalkan dalam strategi meredam polarisasi dan membangun solidaritas inklusif.

Referensi

- Astuti. (2023). Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu di Indonesia. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* , 2(1).
- Bara Izzat Wiwah Handaru. (2025). Memperkuat Kohesi Sosial dalam Masyarakat Plural dalam Konteks Bhinneka Tunggal Ika. *Servoatio Journal* , 4(2).
- Benyamin F. Intan. (2024). *Agama, Politik, dan Pancasila* . Gramedia.
- Budiawan. (2025). *Paradigma Baru dalam Ilmu Komunikasi: Kritis, Digital, Partisipatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- De Gani. (2023). Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Indigenous Knowledge Journal* , 6(9).
- Eka Darmaputera. (2001). *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputera*. BPK Gunung Mulia.
- Franz Magnis-Suseno. (2016). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.
- Husnul Qodim. (2019). Kampung Kuta Religion: Social, Economic, and Religious Structures of Indigenous Community in West Java. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* , 4(1).
- Ingat Derita Gea. (2025). Peran Gereja dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Majemuk di Era Digital. *Vox Divina Journal* , 6(8).
- James M. Gustafson. (1981). *Ethics from a Theocentric Perspective*. Fortress Press.
- Jason Mandryk. (2013). *Operation World: Panduan untuk Mendoakan Semua Bangsa di Dunia*. Katalis Media & Literature.
- John W. Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* . Sage Publications.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Miroslav Volf. (1996). *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Abingdon Press.
- Muhtar Haboddin. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. 8(8).
- N. T. Wright. (2010). *Christianity and the Public Square*. SPCK.
- N.T. Wright. (2006). *Simply Christian: Why Christianity Makes Sense*. HarperOne.
- Roce Marsaulina. (2024). *Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi*. Penerbit Widina.
- Th. Sumartana. (2001). *Kristen dan Pluralisme Budaya*. Interfidei.
- Tim Majalah Tempo. (2010). *Buku Hitam Indonesia*. Gramedia.
- Umi Sumbulah. (2018). Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018). *Building Social and Religious Harmony for Students in Indonesia: Study of Interfaith Harmony Forum's Role of Malang, East Java*.

-
- W Bruce. (2006). *Satu Allah, Satu Tuhan*. BPK Gunung Mulia.
- Yayasan Seni Cemeti. (2002). *Identitas dan Budaya Massa: Aspek-aspek Seni Visual Indonesia*. Yayasan Seni Cemeti.
- Yeni Sri Lestari. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy* , 1(1).
- Yosua Yan Heriyanto. (2025). Moderasi Beragama dalam Perspektif Etika Kristen: Menemukan Titik Temu dalam Perbedaan. *Innovative: Journal of Social Science Research* , 1(1).
- Yusuf Ratu Agung. (2018). Kohesi Sosial dalam Membentuk Harmoni Kehidupan Komunitas. *Jurnal Psikologi Perseptual* , 3(1).